

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANTAN BURUH
MIGRAN KORBAN *TRAFFICKING* DI KAMPUNG BURUH MIGRAN
DESA TRACAP KECAMATAN KALIWIRO WONOSOBO**

**COMMUNITY EMPOWERMENT OF EX MIGRANT LABOR (TRAFFICKING
VICTIMS) IN KAMPUNG BURUH MIGRAN TRACAP VILLAGE KALIWIRO
SUBDISTRICT, WONOSOBO REGENCY**

Oleh : Tissa Silvia, FIS, UNY, tissasilvia@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat mantan buruh migran di Kampung Buruh Migran Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Wonosobo. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan penelitian adalah Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) cabang Wonosobo, Kepala Desa Tracap, Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan di Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Staf Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo, Kasi Pengelolaan Pemasaran Hasil Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Wonosobo dan Mantan Buruh Migran. Instrumen penelitian adalah peneliti dibantu dengan pedoman wawancara, pedoman observasi dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan model dari Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan pemberdayaan masyarakat mantan buruh migran korban *trafficking* di Kampung Buruh Migran dilaksanakan melalui penguatan ekonomi dan penguatan kapasitas. Dalam pelaksanaan pemberdayaan terjadi penurunan tingkat partisipasi mantan buruh migran dari 297 orang, tercatat 72 orang mengikuti pemberdayaan pada tahun 2012 dan sekarang menurun menjadi 29 anggota aktif. Kegiatan pemberdayaan yang berhasil dalam penguatan ekonomi dibidang koperasi dan simpan pinjam sedangkan pemberdayaan yang belum berhasil dibidang peternakan dan pertanian, kemudian dalam penguatan kapasitas pelatihan dan sosialisasi belum berjalan efektif. Keseluruhan pemberdayaan dilaksanakan melalui tujuh tahapan pemberdayaan. Faktor penghambat yang mempengaruhi tercapainya tujuan pemberdayaan adalah kualitas SDM mantan buruh migran yang masih rendah, kurangnya koordinasi dengan pemerintah, harapan masyarakat sasaran mendapatkan bantuan dalam bentuk barang atau uang dan kurangnya peran serta pemerintah dalam keberlanjutan program.

Kata kunci : pemberdayaan, mantan buruh migran, kampung buruh migran

Abstract

This research aimed to analyze the community empowerment of ex-migrant labors in Kampung Buruh Migran (KBM) of Tracap Village, Kaliworo sub-district, Wonosobo regency. The research used descriptive research design with qualitative approach. The research informants are The Head of *Serikat Buruh Migran Indonesia* (SBMI) Wonosobo regency, The Head of Tracap Village, The Head of Woman Empowerment Sub-division in BKBPPA, Staff of *Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi* Wonosobo Regency, Product Marketing Manager of *Dinas Peternakan dan Perikanan* Wonosobo

Regency, and ex migrant labors. The research instrument was the researcher supported by interview guide, observation guide, and documentation. The validation check technique used sources triangulation. The data analysis technique employed model from Miles and Huberman. This research result in the implementation of ex migrant empowerment was implemented by strengthening the economic capacity and human capacity. In the implementation of ex migrant empowerment there was decreased of level participation from ex migrant labors, from 297 members: recorded 72 members following empowerment in 2012 and now it was decreasing to 29 active members. Successful empowerment activity in strengthening economic capacity were *koperasi* and saving and loan. Meanwhile unsuccessfull empowerment activities were farming and agriculture activities. The strengthening capacity and socialization were not yet effective. The empowerment were conducted in seven steps of empowering. The resistans factors were low quality of human resources, lack of coordination with government, the support expectation of targeted community to obtain goods and money, and lack of governments intervention toward the sustainability of the program.

Keyword : empowerment, ex migrant labor, Kampung Buruh Migran

PENDAHULUAN

Permasalahan ekonomi merupakan masalah utama yang dihadapi suatu negara dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Salah satu penyebab gagalnya pembangunan di Indonesia adalah adanya permasalahan pengangguran. Ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan peluang kerja kepada masyarakat, mendorong masyarakat Indonesia untuk melakukan migrasi keluar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Kabupaten Wonosobo adalah pengirim TKI terbesar kedua di Jawa Tengah dinyatakan oleh BNP2TKI. TKI ilegal memiliki risiko mendapatkan tindak kekerasan, pembayaran gaji tidak sesuai kontrak, kriminalitas sampai dengan praktik *trafficking* atau tindak pidana perdagangan orang. Dalam

melindungi para tenaga kerja dari praktik *trafficking* pemerintah telah memiliki peraturan perundangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro merupakan desa yang mayoritas penduduk perempuannya bekerja sebagai TKI dan hampir 90 persen dari TKI atau buruh migran yang ada merupakan korban tindakan *trafficking*. (Serikat Buruh Migran Indonesia Kab Wonosobo 2016)

Permasalahan *trafficking* tersebut merupakan salah satu contoh dampak dari pemerintah yang belum dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang layak. Dalam hal ini tugas pemerintah tidak hanya melakukan penempatan dan

perlindungan terhadap para TKI namun juga melakukan pemberdayaan kepada para purna TKI. Lembaga swadaya masyarakat yaitu Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Wonosobo membentuk kampung buruh migran di Desa Tracap sebagai upaya dalam pemberdayaan masyarakat mantan buruh migran agar dapat mencapai kesejahteraan.

Upaya pemberdayaan masyarakat mantan buruh migran di Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo dilakukan melalui penguatan ekonomi yaitu koperasi buruh migran, kelompok simpan pinjam, peternakan ayam dan kambing, dan budidaya jamur tiram.

Dilain pihak adanya pemberdayaan yang diprakarsai oleh SBMI DPC Kab. Wonosobo belum dapat mengurangi jumlah mantan buruh migran yang kembali bekerja keluar negeri. Pasalnya diadakan kampung buruh migran tersebut adalah untuk mengurangi jumlah warga Desa Tracap yang bekerja keluar negeri namun senyatanya masih terdapat mantan buruh migran yang kembali bekerja diluar negeri. Pemikiran terkait mendapat penghasilan yang lebih banyak jika bekerja di luar negeri membuat mantan buruh migran bekerja kembali keluar negeri.

Kondisi ekonomi dan kesejahteraan para mantan buruh 548

migran di Desa Tracap tergolong masih rendah meskipun sudah diadakan beberapa kegiatan berupaya untuk memberdayakan mantan buruh migran agar lebih mandiri namun pada hasilnya hal tersebut belum dapat meningkatkan perekonomian para mantan buruh migran. Beberapa pelatihan yang bertujuan memberikan simultan kepada mantan buruh migran untuk melakukan usaha justru mengalami kendala, seperti usaha ternak kambing yang justru mengalami kegagalan hal ini memberikan kerugian dan terpaksa usaha ternak kambing harus diberhentikan terlebih dahulu. Kurangnya peran serta pemerintah juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program pemberdayaan yang ada, kontribusi yang diberikan oleh pemerintah lebih bersifat reaktif.

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Wonosobo dirasa perlu untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat mantan buruh migran di Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para mantan buruh migran. Berdasarkan paparan tersebut, maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat Mantan Buruh Migran Korban *Trafficking* di Kampung Buruh Migran Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan filsafat postpositivisme digunakan pada kondisi objek yang alamiah dan peneliti sebagai informan kunci

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, instrument penelitian yaitu peneliti sendiri dibantu pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi.

Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Peneliti memperoleh data primer dari hasil wawancara kepada informan penelitian dan observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang telah diperoleh dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kampung Buruh Migran.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara.

2. Observasi

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara langsung dengan melakukan pengamatan di lapangan melihat infrastruktur, sarana dan prasarana di Kampung Buruh Migran Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo serta kegiatan pemberdayaan yang berlangsung.

3. Dokumentasi

Dokumen-dokumen dalam penelitian ini berupa data-data yang mendukung terkait pelaksanaan pemberdayaan masyarakat mantan buruh migran di Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi pada sumber dimana peneliti akan membandingkan hasil data pengamatan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan, membandingkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan suatu dokumen yang berkaitan yaitu membandingkan data primer dengan data sekunder.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman 1984 dalam (Sugiyono, 2015:246). Teknik analisis ini mempunyai empat alur yang digunakan yaitu pengumpulan

data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan menurut Priyono dan Pranarka (1996:77) memiliki dua makna dimana pengertian pemberdayaan yang pertama adalah *to give power authority* dimana hal ini dimaknai meliputi memberikan kekuasaan, memindahkan kekuatan atau mendelegasikan kewenangan kepada pihak yang kurang atau bahkan belum berdaya. Kemudian pemaknaan yang kedua adalah *to give ability to enable* dimana arti dari makna yang kedua ini adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak-pihak lain untuk melakukan sesuatu.

SBMI DPC Kab. Wonosobo merupakan pihak yang mendampingi pemberdayaan di Kampung Buruh Migran hal ini didasarkan agar pemberdayaan yang dilakukan kepada mantan TKI korban *trafficking* dapat merubah keadaan ekonomi maupun sosial mereka sehingga dapat lebih berdaya. Pemberdayaan dilaksanakan melalui dua jenis pemberdayaan yaitu pemberdayaan melalui penguatan ekonomi dan penguatan kapasitas. Kedua pemberdayaan tersebut melalui tahapan-tahapan pemberdayaan

berdasarkan teori (Isbandi 2008:244- 258) yakni sebagai berikut:

1. Pemberdayaan melalui penguatan ekonomi

Pemberdayaan melalui penguatan ekonomi dilaksanakan dengan kegiatan usaha peternakan kambing, peternakan ayam, budidaya jamur tiram, koperasi dan simpan pinjam. Pemberdayaan ekonomi diharapkan dapat memperbaiki kondisi perekonomian mantan buruh migran agar lebih sejahtera.

a. Tahap Persiapan

Tahap Persiapan dilaksanakan dari segi persiapan petugas dan persiapan lapangan (Isbandi 2008:244). Dimulai dengan pengelompokan, pengorganisasian dan pendataan mantan buruh migran. Dilanjutkan sosialisasi terkait program pemberdayaan dan penekanan partisipasi mantan buruh migran

b. Tahap *assesment*

Tahap *assesment* dilakukan dengan identifikasi masalah ataupun kebutuhan dan juga sumber daya yang dimiliki oleh kelompok sasaran. (Isbandi 2008:244-258). Pengkajian dilakukan oleh SBMI DPC Kab. Wonosobo dengan berembug atau bermusyawarah dengan mantan buruh migran yang ada di Desa Tracap dan mengundang tokoh masyarakat. Dari hasil pengidentifikasian masalah

didapatkan hasil bahwa permasalahan mantan buruh migran yakni belum adanya pemasukan setelah kembali ke Indonesia. Sedangkan potensi yang dimiliki adalah kemauan para mantan buruh migran untuk bergerak dan bekerja secara gotong royong.

c. Tahap Perencanaan

Dalam tahapan ini para pelaku perubahan tersebut berupaya untuk menggerakkan warga untuk dapat lebih partisipatif (Isbandi 2008:244-258). Mantan buruh migran berpartisipasi dan menentukan program pemberdayaan dari permasalahan yang dihadapi. Kebutuhan akan penghasilan bulanan yang nantinya dapat memperbaiki perekonomian para mantan buruh migran diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan melalui penguatan ekonomi dengan usaha ternak kambing, ternak ayam, kelompok simpan pinjam dan koperasi. Dalam perencanaan ini para mantan buruh migran bersama SBMI DPC Kab. Wonosobo menyusun persiapan untuk pencarian dana, dan narasumber pelatihan.

d. Tahap Perumusan Rencana Aksi

Dalam tahapan ini para pelaku perubahan akan membantu kelompok sasaran untuk menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka

lakukan guna mengatasi permasalahan yang dihadapi (Isbandi 2008:250). Dilaksanakan musyawarah setelah bantuan dana disetujui oleh (IOM) untuk pembelian 100 ekor kambing Ciamis dan 500 ekor ayam petelur. Model pengelolaan shift menjadi pilihan. Kelompok simpan pinjam ditentukan untuk memberikan setoran Rp 5 ribu rupiah setiap pertemuan, selain itu juga ditetapkan adanya suku bunga dalam peminjaman yaitu sebesar 2,5% dan dilakukan pertemuan setiap tgl 18. Koperasi telah mendapatkan persetujuan bantuan dana dari BNP2TKI dan Desa Tracap, ditentukan Dusun Jojogan sebagai lokasi pendirian koperasi.

e. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahapan ini tahap terpenting dalam proses pemberdayaan ada pada tahap pelaksanaan ini dimana sesuatu yang telah direncanakan akan terlihat berhasil tidaknya dalam tahap pelaksanaan (Isbandi 2008:251). Usaha peternakan kambing dan ayam mengalami kegagalan karena metode pengelolaan shift, dan rendahnya SDM para pengelola. Kemudian diganti dengan budi daya jamur tiram yang juga hanya berjalan satu tahun dan mengalami kegagalan, sehingga sekarang kembali melakukan usaha ternak kambing namun dengan metode pengelolaan yang berbeda.

Diberikan pelatihan ternak kambing oleh Dinas Peternakan dan pemberian pelatihan ternak ayam oleh BP3TKI. Simpan pinjam berjalan sesuai dengan perencanaan dan terdapat 22 anggota aktif, sistem pembukuan masih menggunakan pembukuan manual. Usaha koperasi berjalan cukup baik dan sekarang memiliki satu cabang di Desa Tracap.

f. Tahap evaluasi

Tahapan ini merupakan alat pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berlangsung pada pemberdayaan masyarakat lebih baik dilakukan dengan melibatkan warga (Isbandi 2008: 252-253). Usaha peternakan dilaksanakan evaluasi satu bulan sekali dengan berkumpulnya kelompok simpan pinjam yaitu tgl 18. Pemerintah Desa ikut dalam proses evaluasi. Dinas Peternakan melakukan evaluasi dari kegiatan pengobatan hewan massal. Simpan pinjam dilaksanakan evaluasi satu tahun sekali bersamaan dengan pembagian hasil usaha yaitu mendekati Hari Raya Idul Fitri. Koperasi dilaksanakan evaluasi satu tahun sekali bersamaan dengan simpan pinjam dan menghadirkan perangkat desa sebagai bentuk pertanggung jawaban pemberian dana.

g. Tahap terminasi

Tahap terminasi atau tahap akhir pemberdayaan dimana sudah selesainya hubungan secara formal dengan komunitas sasaran (Isbandi 2008:257). Dalam tahapan ini SBMI DPC Kab. Wonosobo belum memberikan jangka waktu pemberhentian pendampingan pemberdayaan yang dilakukan di Kampung Buruh Migran.

2. Pemberdayaan melalui penguatan kapasitas

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan dari segi persiapan petugas dan persiapan lapangan (Isbandi 2008:244). Pemberdayaan penguatan kapasitas ini dilakukan dari persiapan para petugas dari BKBPPA, petugas mempersiapkan untuk memberikan pelatihan sebagai media transfer ketrampilan yang nantinya dibutuhkan sesuai dengan kondisi mantan buruh migran. Disnakertrans juga melakukan persiapan petugas dengan menyamakan persepsi para pelaku pemberdayaan.

b. Tahap *assesment*

Tahap pengkajian dilakukan dengan identifikasi masalah ataupun kebutuhan dan juga sumber daya yang dimiliki oleh kelompok sasaran. (Isbandi 2008:244-258). Hasil pengidentifikasian masalah yang dihadapi mantan buruh migran adalah belum adanya pemasukan setelah kembali ke Indonesia karena

minimnya ketrampilan yang dimiliki dan keharmonisan keluarga mantan buruh migran yang juga dirasa kurang. Sedangkan potensi yang dimiliki adalah kemauan para mantan buruh migran untuk bergerak dan bekerja secara gotong royong. SBMI DPC Kab. Wonosobo ikut serta mendampingi pengkajian yang dilaksanakan oleh SKPD terkait.

c. Tahap Perencanaan

Tahapan ini adalah tahapan dimana para pelaku perubahan tersebut berupaya untuk menggerakkan warga untuk dapat lebih partisipatif (Isbandi 2008:244-258). Belum dimilikinya ketrampilan-ketrampilan para buruh migran mendorong untuk merencanakan dilaksanakannya pelatihan yang dapat menambah ketrampilan sehingga dapat bermanfaat. d. Tahap Perumusan Rencana Aksi

Dalam tahapan ini para pelaku perubahan akan membantu kelompok sasaran untuk menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan guna mengatasi permasalahan yang dihadapi (Isbandi 2008:250). Pelatihan tata boga dipilih karena memberikan ketrampilan untuk membuat usaha catering dan waktu pelaksanaan yang berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri.

Kemudian pelatihan membuat dompet didasari karena pelatihan membuat ketrampilan barang yang nantinya dapat dijual dan menambah pendapatan mantan buruh migran. Sosialisasi keharmonisan keluarga dipilih berdasarkan identifikasi BKBPPA. Sosialisasi migrasi yang aman dipilih karena kecenderungan TKI merupakan korban TPPO.

e. Tahap Pelaksanaan

Tahap terpenting dalam proses pemberdayaan ada pada tahap pelaksanaan ini dimana sesuatu yang telah direncanakan akan terlihat berhasil tidaknya dalam tahap pelaksanaan (Isbandi 2008:251). Pelatihan tata boga diikuti oleh para mantan buruh migran namun hanya tercatat 2 mantan buruh migran yang mengimplementasikan ilmu tersebut untuk usaha catering. Kemudian pelatihan membuat dompet berjalan sesuai perencanaan dengan mendatangkan pengusaha dompet tersebut untuk menjadi narasumber namun belum ada mantan buruh migran yang tercatat mengimplementasikan ilmu tersebut. Sosialisasi keharmonisan keluarga diberikan oleh BKBPPA dilaksanakan sesuai perencanaan. Sosialisasi migrasi yang aman dilaksanakan oleh Disnakertrans mendatangkan tidak hanya buruh migran melainkan keluarga sehingga

dapat mengedukasi tidak hanya mantan TKI.

f. Tahap evaluasi

Tahap evaluasi adalah alat pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berlangsung pada pemberdayaan masyarakat lebih baik dilakukan dengan melibatkan warga (Isbandi 2008: 252-253). Bentuk evaluasi dari pemerintah penyelenggara pelatihan adalah evaluasi selama satu tahun sekali yang dilakukan oleh BKBPPA. Evaluasi dilaksanakan tidak terkhusus untuk mengkaji pelatihan di Kampung Buruh Migran saja melainkan keseluruhan pelatihan yang dilaksanakan oleh BKBPPA di Kabupaten Wonosobo. Sedangkan evaluasi dari hasil sosialisasi yang dilaksanakan oleh Disnakertrans lebih kepada pemantauan terkait TKI yang berangkat keluar negeri melalui jalur legal, apakah terdapat kenaikan atau penurunan.

g. Tahap terminasi

Tahap terminasi merupakan akhir pemberdayaan dimana sudah selesainya hubungan secara formal dengan komunitas sasaran (Isbandi 2008:257). Dalam tahapan ini pemutusan hubungan secara resmi oleh SBMI DPC Kab.Wonosobo juga belum dapat dilaksanakan sebagai lembaga penanggungjawab Kampung Buruh Migran Indonesia.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat mantan buruh migran terdapat faktor-faktor penghambat antara lain: Kualitas SDM yang masih rendah, Kurangnya koordinasi dengan Pemerintah, Harapan masyarakat sasaran mendapatkan bantuan dalam bentuk barang atau uang, Minimnya campur tangan pemerintah dalam keberlanjutan program.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut: Pemberdayaan masyarakat mantan buruh migran korban *trafficking* di Kampung Buruh menunjukkan penguatan ekonomi terdapat kegagalan yaitu usaha ternak kambing, usaha ternak ayam dan budi daya jamur tiram sedangkan pemberdayaan yang dianggap berhasil yaitu dari kelompok simpan pinjam dan koperasi. Pelatihan yang dilaksanakan sebagai penguatan kapasitas belum dapat diimplementasikan secara maksimal. Pemberdayaan yang dilaksanakan belum berjalan efektif dilihat dari jumlah partisipasi mantan buruh migran yang mengalami penurunan uang, minimnya campur tangan pemerintah dalam keberlanjutan program.

Saran

1. SBMI DPC Kabupaten Wonosobo sebagai pihak pendamping dalam pemberdayaan masyarakat mantan buruh migran korban *trafficking* sebaiknya memiliki sistem pendataan yang tertib dan jelas.
2. Pemerintah Kabupaten Wonosobo khususnya para pihak yang memiliki hubungan dalam pemberdayaan masyarakat sebaiknya meningkatkan peran serta dalam pemberdayaan masyarakat mantan buruh migran
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebaiknya dapat meningkatkan peran serta dalam pemberdayaan di Kampung Buruh Migran.
4. Mantan Buruh Migran Korban *trafficking* harusnya lebih aktif dan partisipatif dalam pelaksanaan pemberdayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Haris 2005. *Gelombang Migrasi dan Jaringan Perdagangan Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Abu Ahmadi. *Ilmu Sosial Dasar*. 2003. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya

Andi Prastowo. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jakarta: Ar-Ruzz Media

Anwar. 2007. *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*

(Perubahan Sosial Melalui Pembelajaran Vocational Skills Pada Keluarga Nelayan). Bandung : Alfabeta.

Ambar Teguh Sulistyani. 2007. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.

Burhan Bungin. 2010. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenama Media Group

Depi Maryati. 2016. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Pascatambang Pasir Besi Oleh PT Aneka Tambang TBK Di Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta

Haris Herdiansyah. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Selemba Humanika

Haris Herdiansyah. 2015. *Wawancara, Observasi dan Focus Groups*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Ida Bagoes Mantra. 2003. *Demografi Umum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Isbandi Rukminto Adi. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press

Jumrotul Hasanah. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Berketerbelakangan Mental dalam Mencapai Keswadayaan Masyarakat di*

- Kampung Idiot Kecamatan
Jambon Kabupaten
Ponorogo. *Skripsi*.
Yogyakarta: Universitas
Negeri Yogyakarta
- Khoerudin, H. 1992. *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta :
Liberti
- Lee, Everett S. 2000. *Teori Migrasi*.
Translated by Hans Daeng.
Ditinjau kembali oleh Ida
Bagus Mantra. Edisi VII.
Yogyakarta: UGM Press.
- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan
Almanshur. 2012. *Metodologi
Penelitian Kualitatif*.
Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Moleoung, J Lexy. 2014. *Metode
Penelitian Kualitatif Edisi
Revisi*. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya
- Mudrajad Kuncoro. 2004. *Ekonomi
Pembangunan, Teori
Masalah dan Kebijakan*.
Yogyakarta: UPP AMP
YKPN
- Mulyadi S. 2003. *Ekonomi Sumber
Daya Manusia*. Jakarta : Raja
Grafindo Persada
- Onny S. dan AMW. Pranarka. 1996.
*Pemberdayaan: konsep,
kebijakan, dan Implementasi*.
Jakarta: CSSIS
- Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 26 Tahun 2012
Tentang Pemberdayaan
Masyarakat yang akan
menjadi calon dan purna
Tenaga Kerja Indonesia
- Rahardjo Adisasmita. 2006.
Membangun Desa Perspektif.
Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sanapiah Faisal. 2007. *Format-
format Penelitian Sosial*.
- Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sentanoe Kertonegoro. 1994.
Migrasi Tenaga Kerja.
Jakarta: Agung.
- Sri Kuntari. 2009. *Strategi
Pemberdayaan (Quality
Growth) Melawan
Kemiskinan*. Yogyakarta:
B2P3KS Press.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian
Kuantitatif Kualitatif dan
R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suhartini dkk. 2005. *Model-model
Pemberdayaan Masyarakat*.
Yogyakarta: Pustaka
Perantren Lkis
- Suharto, E. 2005. *Membangun
Masyarakat Memberdayakan
Rakyat*, Bandung: PT Refika
Aditama
- Totok M dan Poerwoko S. 2013.
*Pemberdayaan Masyarakat
(Dalam Perspektif Kebijakan
Publik)*. Bandung: Alfabeta
- Undang-undang Nomor 21 Tahun
2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan
Orang
- Vandy Yoga Swara. 2012. Perubahan
Habitus TKI Korban
Perdagangan Manusia
Melalui Pemberdayaan di
Kampung Buruh Migran
Desa Tracap Kabupaten
Wonosobo. *Skripsi*.
Yogyakarta: Universitas
Gadjah Mada